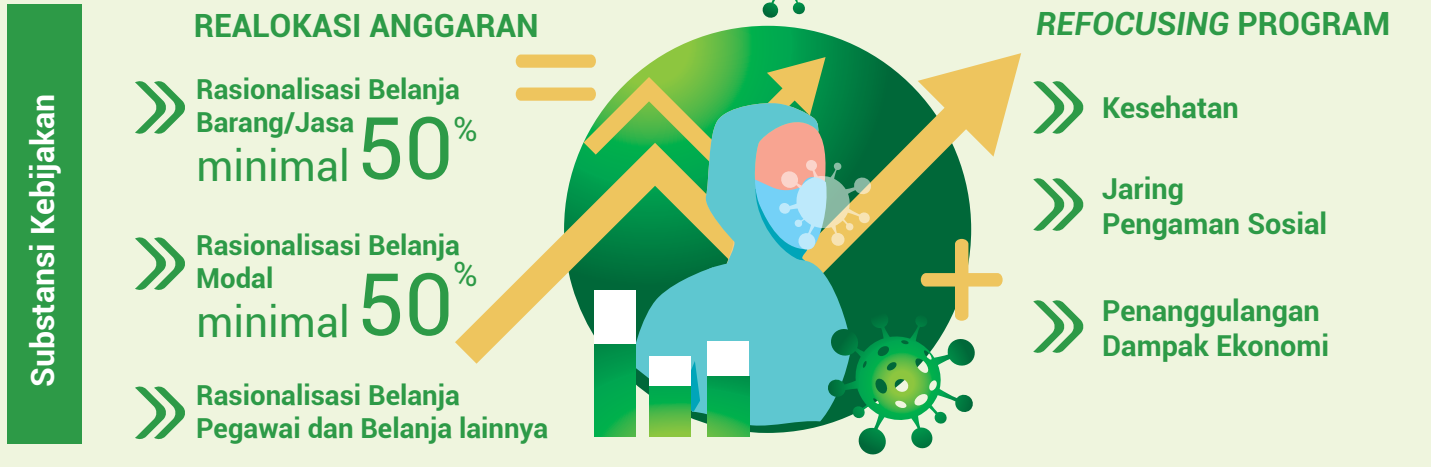


REALOKASI ANGGARAN DAN PENYESUAIAN (REFOCUSING) PROGRAM:



Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi



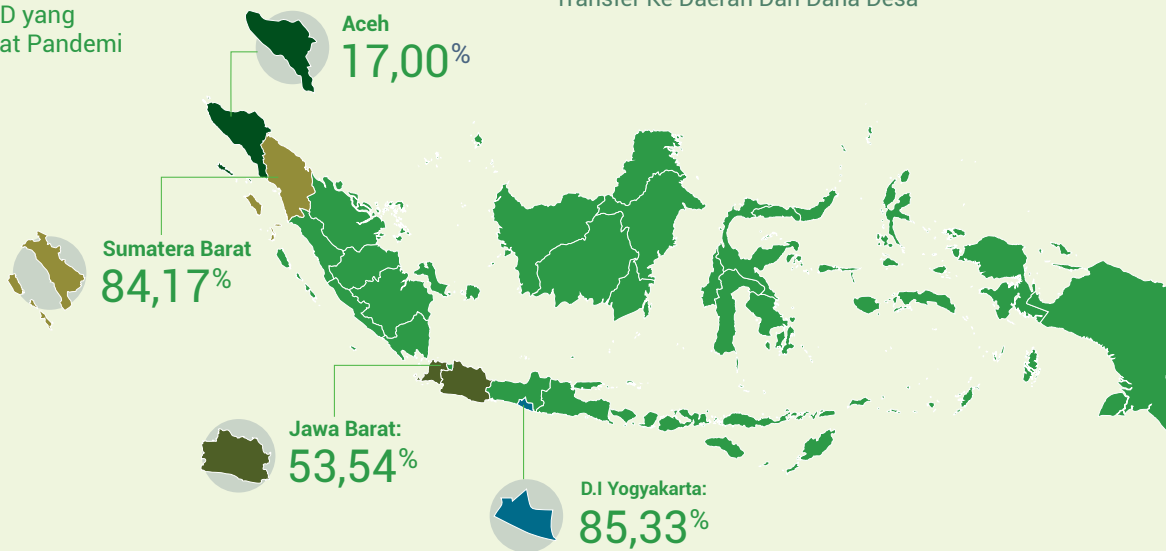
Pemerintah Daerah Melakukan Rasionalisasi dengan Memperhatikan:

- Kemampuan Keuangan Daerah
- Perkembangan Pandemi di Daerah
- Penurunan PAD yang Ekstreme akibat Pandemi

Pedoman Kebijakan

SKB Mendagri & Menkeu
Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK 07/2020 serta PMK No 35/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Kinerja Penyerapan Anggaran COVID-19



REALOKASI

FUNDAMENTAL

- Proyeksi Penerimaan Daerah Menurun
- Kurangnya Ketersediaan Dana Akibat Pengurangan Dana Transfer

SITUASIONAL

- Regulasi di awal yang kerap berubah
- Keterbatasan anggaran akibat beberapa proyek sudah berjalan dan penganggaran Pilkada 2020
- Persoalan pengambilan keputusan di masa *work-from-home* membuat proses realokasi anggaran semakin rumit

REFOCUSING

FUNDAMENTAL

- Koordinasi Antar-OPD Kurang Optimal
- Akurasi Data untuk Distribusi Bantuan

SITUASIONAL

- Identifikasi Kebutuhan dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Turut Menghambat Penyesuaian Program

REALISASI

FUNDAMENTAL

- Komitmen & Kapasitas SDM Pemerintah Daerah
- Kehati-hatian Pelaksana Anggaran

SITUASIONAL

- Keterlambatan pencairan dana transfer

SDGs DI MASA PANDEMI

1 MENGURANGI KEMISKINAN



Data Kemiskinan Indonesia (Juta Jiwa)

Maret 2019	September 2019	Maret 2020
25.144,72	24.785,87	26.424,02

Terjadi peningkatan jumlah kemiskinan (year-on-year)

Gelombang PHK dan resesi memicu terjadinya lonjakan angka kemiskinan

Ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini

2 KESEHATAN



Penanganan *stunting* adalah prioritas nasional 2020 (sebelum pandemi)



Di awal tahun Sikka dan beberapa daerah di NTT terjangkit wabah DBD



Fokus nasional berubah tatkala pandemi COVID-19 menjangkit Indonesia dan jumlahnya terus bertambah hingga kini



Mitigasi DBD di Kab. Sikka (NTT) berjalan baik di masa pandemi (anggaran termuat dalam realokasi)



Realokasi anggaran akan menghambat penurunan angka *stunting* yang ditargetkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 (tahun 2019 masih 27%)



Realokasi untuk penanggulangan COVID-19 mestinya tidak mengorbankan penguatan kesehatan lainnya

3 EKONOMI



Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tahun	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Triwulan 5
2019	5.07	5.05	5.02	4.97	5.02
2020	2.97	-5.32	-3.49		

Data BPS 2020



Penghentian sejumlah aktivitas ekonomi memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi



Realisasi anggaran pemulihan dampak ekonomi diharapkan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi

Rekomendasi

UMUM

- Penanggulangan pandemi adalah prasyarat pemulihan ekonomi
- Desentralisasi manajemen penanganan COVID-19
- Integrasi protokol pengawasan
- Mengoptimalkan alternatif pembiayaan yang tersedia

PUSAT

- Sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai terapi kejut bagi pemerintah daerah
- Kerangka asistensi dan pengendalian dari pusat
- Perubahan paradigma sanksi dalam masa pandemi

DAERAH

- Optimalisasi fiskal di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Inklusi keuangan Sinkronisasi dan
- Pembaharuan Data Menjaga kondisi dunia usaha

Sekretariat UCLG ASPAC

Balai Kota DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Tel : +62 21 3890 1801, Fax : +62 21 3890 1802

Email: sekretariat@uclg-aspac.org

Situs: <https://uclg-aspac.org> | <https://localisesdgs-indonesia.org>

